

Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Agustina Rahmawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta
agustinarahma@amikom.ac.id

ABSTRAK

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi penyelenggara diklat teknis pengelolaan aset/barang daerah Provinsi Jawa Tengah. Diklat teknis pengelolaan aset/barang daerah bertujuan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang perencanaan, pemeliharaan dan penghapusan aset sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah. Identifikasi masalah yang ditemukan adalah sebagian peserta diklat bukan pegawai yang tugasnya mengelola aset/barang daerah sehingga masih diperlukannya peningkatan kompetensi, serta beberapa peserta kurang setuju, bahkan tidak setuju atas keberhasilan penyelenggaraan diklat pada bidang akademis maupun non akademis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga dapat berusaha menangkap dan menjelaskan terkait dengan fenomena yang ditemukan. Hasil dari Penelitian ini, Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar dan efektif yang dilihat dari proses penyelenggaraannya yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan diklat meliputi persiapan administrasi dan persiapan akademis, persyaratan peserta dan widyaiswara, ketersediaan sarana dan prasarana apakah telah sesuai dengan kebutuhan diklat atau belum, pihak-pihak yang berperan sebagai panitia dalam diklat, serta evaluasi diklat. Selain itu, sasaran dan tujuan dari penyelenggaraan diklat telah tepat sebagai sarana menambah pengetahuan dan kemampuan PNS dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengelola aset/barang. Rekomendasi dari penelitian ini disarankan agar penyusunan program diklat tetap sesuai dengan analisis kebutuhan diklat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mengawasi kondisi sarana prasarana agar tetap layak untuk digunakan serta sikap dan perilaku pegawai diharapkan selalu menunjukkan profesionalisme dan transparan dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya.

Kata kunci : Efektivitas, kompetensi, aset, diklat

ABSTRACT

Regional Human Resource Development Agency (BPSDMD) of Central Java Province is an organizer organizer of technical management of assets / goods in the province of Central Java. The technical training on asset management / regional goods aims to apply an understanding of planning, maintenance and asset deletion so as to provide optimal contribution for local government. Identification of problems found are some non-employee

training participants whose job is to manage the assets / local goods so that the competence is still needed, and some participants disagree, not even agree on the success of academic and non academic training. This research uses descriptive qualitative research method so that it can try to catch and explain related to the phenomenon found. Result of this Research, Provision of Technical Training of Asset Management / Goods Area of Central Java Province runs smoothly and effectively seen from the implementation process which consists of preparation of training implementation covers preparation of administration and academic preparation, participant requirement and widyaiswara, availability of facility and infrastructure whether appropriate with the needs of the training or not, the parties who act as committee in the training, and evaluation of the training. In addition, the goals and objectives of the implementation of training and training have been appropriate as a means of increasing the knowledge and ability of civil servants in completing their work as a manager of assets / goods. The recommendation of this research is suggested that the preparation of training program remains in accordance with the analysis of training needs, the Regional Human Resource Development Board oversees the condition of the infrastructure to remain eligible to be used and the attitude and behavior of employees is expected to always show professionalism and transparency in completing tasks and functions.

Keywords: *Effectiveness, competence, assets, training*

A. PENDAHULUAN

Proses pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya dijelaskan sebagai proses untuk meningkatkan kualitas manusia dan dapat memberikan perubahan kinerja yang lebih produktif dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembangunan nasional secara inovatif dan kreatif. Pengembangan sumber daya manusia ini memunculkan faktor-faktor yang telah ditentukan dalam hal peningkatan pendidikan dan kompetensi yang mengarah pada perbaikan efisiensi dan produktifitas kerja dalam organisasi. Sedangkan bagian internal organisasi sendiri diharapkan aparatur mampu memberikan motivasi berupa penguasaan penggunaan teknologi dan peningkatan kemampuan pegawai yang profesional dan pemberdayaan pegawai dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan partisipasi yang optimal.

Pada kenyataannya pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang urgent bagi pembangunan bangsa. Bukti yang menguatkan pernyataan tersebut contohnya Negara-negara yang tergolong dalam Negara maju membuktikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ialah kunci kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik.

Isu pokok pengembangan sumber daya manusia ini bisa dilihat dari proses peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan dimana pemilihan jenis dan tipe pelatihan pengembangan SDM yang dinilai cocok dan sesuai dengan kebutuhan yang selama ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Disarankan dengan memilih pelatihan yang tepat, dapat merealisasikan tujuan secara efektif dan efisien. Program pendidikan dan pelatihan atau biasanya disebut program diklat merupakan pengembangan sumber daya manusia

aparatur berbasis kompetensi yang memiliki peran yang cukup strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia aparatur sehingga diharapkan menjunjung tinggi profesionalisme baik memiliki kompetensi serta sikap dan perilaku sesuai dengan tugas dan peran yang dijalankan. Dalam mengikuti program diklat, pegawai diharapkan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang nantinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur. Organisasi pemerintahan diharapkan terus mengawasi dan memantau kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan motivasi yang mereka miliki agar disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan suatu pekerjaan serta lingkungan internal maupun eksternal yang harus dipenuhi agar tercapainya tujuan organisasi dengan baik dan benar. Program pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dimana maksud dari penyelenggaraan diklat yaitu memperbaiki pelayanan pada masyarakat melalui pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan diklat untuk mengembangkan kapasitas pegawai disusun dalam rangka peranan diklat sebagai sub sistem pembinaan atas pelaksanaan pemerintahan daerah. Diklat diselenggarakan oleh lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi kediklatan dan merupakan bagian dari sistem manajemen kepegawaian. Diklat menjadi suatu kewajiban bagi pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia aparatur.

Diklat teknis yang diselenggarakan pada Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah salah satunya ialah Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah. Pemerintah daerah memiliki sumber daya yang penting dimana sumber daya tersebut berperan sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting karena aset daerah harus dikelola secara memadai. Pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang diterima daerahnya. Potensi yang dimiliki dari sektor aset di daerah tidak hanya dalam hal pembangunan aset tapi menyangkut manajemen aset yang telah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Tujuan umum dari penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan peserta diklat agar mampu melaksanakan tugas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran aset daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah. Pihak yang berwenang sebagai penyelenggara dan panitia penyelenggara Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ialah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pencapaian daya guna dan hasil guna yang maksimal telah dibentuk tim penyelenggara dengan keputusan dari Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah No.893.3/9335 yang keanggotaannya terdiri dari DPPAD Provinsi Jawa Tengah (tenaga pengajar) dan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah (tenaga pengajar dan fasilitator).

Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah ini setiap pelaksanaannya terdiri dari 35 orang peserta diklat yang terdiri dari para pejabat/staf potensial di SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mengutamakan pada staf yang tugas dan

fungsi pokoknya sebagai pengurus barang/pengelolaan aset. Berikut ini ialah tabel daftar alokasi peserta Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017

Tabel 1.1
Daftar Alokasi Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Angkatan.	Peserta
2017	40	1358
2016	33	1155
2015	48	71
2014	55	1920

Sumber : Laporan akhir penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa peserta Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun. Namun, sebagian bukan merupakan pegawai yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pengurus barang atau pengelolaan aset. Sebagian tersebut merupakan staf di bidang lain maupun hanya sebagai staf biasa. Seharusnya pada diklat teknis pengelolaan aset daerah ini lebih mengutamakan peserta diklat yang pada dasarnya ialah pegawai yang sehari-hari tugas dan kewajibannya mengurus barang milik instansinya atau pegawai yang bertugas mengelola aset yang dimiliki instansinya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari diklat teknis ini dapat tercapai

dan efektif yaitu meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai dalam menangani tugas dan kewajibannya sebagai pengelola dan pengurus aset sehingga pegawai ini dapat mengaplikasikan pemahamannya tentang perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan aset.

Program pembelajaran Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari kurikulum dan tenaga pengajar. Jumlah Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah sebanyak 70 jam pelajaran dan tiap jam pelajaran selama 45 menit, dengan materi pembelajaran sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kurikulum dan Tenaga Pengajar
Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	MATA PELAJARAN	Target Jam Pelajaran	Realisasi Jam Pelajaran	PENGAJAR/IN STANSI
A	MATA PELAJARAN DASAR	4	4	
1	Kiat-kiat mempertahankan WTP	4	4	Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah
B	MATA PELAJARAN POKOK	52	50	
1	Gambaran umum pengelolaan keuangan, aset dan barang milik daerah	4	2	Badan diklat Depdagri
2	Manajemen Aset	4	4	DPPAD Prov. Jateng
3	Penghapusan dan pemindahtanganan aset dan barang daerah	4	4	DPPAD Prov. Jateng
4	Penatausahaan Aset	4	4	DPPAD Prov. Jateng
5	Penggunaan dan pemanfaatan Aset/Barang Milik daerah	4	4	DPPAD Prov. Jateng
6	Penilaian Aset/barang milik daerah	4	4	DPPAD Prov. Jateng
7	Penyusunan Neraca Aset Daerah	4	4	Biro Keuangan Setda Prov. Jateng
8	Pemeliharaan dan Pengamanan Aset/Barang	4	4	DPPAD Prov. Jateng
9	Sistem Akuntansi Aset Daerah	4	4	Biro keuangan Setda Prov. Jateng
10	Praktek	10	10	Tim
11	Seminar	6	6	
C	LAIN-LAIN	14	14	
1	Pengenalan Hak asasi manusia	4	4	Kanwil kemenkum & HAM Jateng
2	Ujian	10	10	Penyelenggara
	Jumlah.....	70	68	

Sumber: Laporan akhir penyelenggaraan diklat teknis pengelolaan aset daerah Prov. Jawa Tengah 2016

Susunan kurikulum diklat teknis di atas merupakan penjabaran dari jadwal pembelajaran. Mata pelajaran dasar membutuhkan waktu 4 jam pelajaran dengan pengajar dari Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, Mata pelajaran pokok membutuhkan 52 jam pelajaran dan lain-lain membutuhkan 14 jam pelajaran. Namun, penyelenggaraan mata pelajaran pokok tentang gambaran umum pengelolaan keuangan, aset dan barang milik daera tidak sesuai dengan Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah yang memberikan waktu selama 4 jam. Mata pelajaran pokok tersebut hanya berlangsung selama 2 jam pelajaran sehingga total jam pelajaran pada Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah hanya 68 jam pelajaran. Seharusnya kurikulum diklat teknis pengelolaan aset daerah yang telah ditetapkan ini dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran yang telah ditetapkan. Jam pelajaran yang telah ditentukan ini pada dasarnya telah disesuaikan dengan kebutuhan diklat peserta yang sebelumnya

telah dianalisis seberapa banyak waktu yang dibutuhkan peserta untuk memahami dan mempelajari mata pelajaran yang diberikan. Jika pada kenyataannya jam pelajaran tidak sesuai dengan kurikulum, kemungkinan mata pelajaran yang dikurangi waktunya tersebut kurang dipahami dengan baik oleh para peserta diklat. Pada penyelenggaraan diklat teknis pengelolaan aset ini, tenaga pengajar dalam proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran andragogi yang bertujuan mencapai daya guna dan hasil guna diklat melalui teknik ceramah, diskusi, Latihan/Penugasan, Ujian Tertulis.

Salah satu latihan yang dijalankan peserta diklat sebelum diadakannya ujian tertulis ialah Pre test dan Post Test yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi dan kemampuan peserta diklat terkait pengetahuannya tentang pengelolaan aset. Berikut adalah data nilai Pre Test dan Post Test peserta diklat teknis pengelolaan aset daerah :

Tabel 1.3
Data Nilai Pre Test dan Post Test Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	NILAI	GRADE	Pre Test	Post Test	PREDIKAT
1	91-100	A	-	-	Sangat Memuaskan
2	81-90	A-	-	-	Memuaskan
3	76-80	B+	5	14	Sangat Baik
4	71-75	B	12	13	Baik
5	66-70	C+	18	8	Cukup Baik
6	65	C	-	-	Cukup
7	<65	D	-	-	Buruk/Gagal
JUMLAH PESERTA			35	35	

Sumber : Laporan Evaluasi Diklat Teknis Pengelolaan Aset/Barang Daerah Th 2016

Data diatas menerangkan bahwa pada hasil pelaksanaan Pre Test sebanyak 9 orang mendapat peringkat B+, 8 peserta

mendapat nilai B dan yang lainnya mendapat C+ yaitu sebanyak 18 peserta. Sedangkan hasil Post Test menunjukkan

peningkatan dimana 14 orang mendapat nilai B+, 13 peserta mendapat nilai B dan sisanya mendapat nilai C+ yaitu sebanyak 8 peserta. Sebagian peserta diklat termasuk kategori yang telah baik pengetahuannya dalam pengelolaan aset/barang. Namun, masih ada sebagian peserta yang harus meningkatkan pengetahuannya dan kompetensinya tentang pengelolaan barang/aset mengingat tugas dari pengelola aset membutuhkan suatu kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu sebelum berakhirnya proses penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, para peserta diklat diwajibkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan diklat teknis pengelolaan aset ini dengan mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar panitia penyelenggara hingga tenaga pengajar. Berikut adalah data penilaian peserta Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah atas keberhasilan penyelenggara pada bidang akademis dan non akademis.

Tabel 1.4
Penilaian Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Keberhasilan Penyelenggara pada Bidang Akademis dan Non Akademis

NO	PENILAIAN	BIDANG	
		AKADEMIS	NON AKADEMIS
1	Sangat Setuju	30,05 %	25,51 %
2	Setuju	41,84 %	65,89 %
3	Kurang Setuju	27,90 %	8,07 %
4	Tidak Setuju	0,21 %	0,53 %
JUMLAH		100,00 %	100,00 %

Sumber : Laporan Evaluasi Diklat Teknis Pengelolaan Aset/Barang Daerah Th 2016

Data penilaian peserta diklat terhadap penyelenggara Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah diatas dapat dilihat bahwa pada bidang akademis, peserta yang memilih sangat setuju sebanyak 30,05 %, peserta yang memilih setuju 41,84 %, peserta yang memilih kurang setuju sebanyak 27,90 % dan peserta yang menilai tidak setuju terhadap keberhasilan penyelenggara diklat sebanyak 0,21 %. Sedangkan bidang non akademis, peserta yang memilih sangat setuju sebanyak 25,51 %, peserta yang memilih setuju 65,89 %, penilaian kurang setuju dipilih sebanyak 8,07 % dan terakhir pada bidang non akademis sebanyak 0,53 % peserta memilih tidak

setuju pada keberhasilan penyelenggara diklat. Hal tersebut berarti tidak sepenuhnya penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah dikatakan berhasil, karena masih ada beberapa pegawai yang memilih kurang setuju dan tidak setuju. Hal itu dikarenakan peserta merasa ada hal-hal yang kurang atau tidak sesuai pada bidang akademis dan non akademis yang diberikan oleh tenaga pengajar diklat. Seharusnya sebelum diselenggarakan diklat teknis ini, penyelenggara lebih menganalisis lagi kebutuhan diklat seperti apa yang dibutuhkan peserta diklat dan kompetensi dari pengajar diklat serta fasilitas diklat yang dibutuhkan sehingga pada proses

pembelajaran, peserta dapat menerima dan memahami materi pelajaran yang diberikan.

Peserta diklat teknis ini tidak hanya mengevaluasi penyelenggaraan dari segi akademik maupun non akademik. Namun, peserta diklat juga diberi tugas

mengevaluasi penyelenggaraan pada substansi materi pelajaran yang diberikan. Berikut adalah penilaian peserta diklat terhadap substansi materi pelajaran yang diberikan pada saat penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 1.5
Penilaian Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Substansi Materi Pelajaran

NO	PENILAIAN	SUBSTANSI
1	Sudah Sesuai	75,46 %
2	Kurang Sesuai	24,54 %
JUMLAH		100,00 %

Sumber : Laporan Evaluasi Diklat Teknis Pengelolaan Aset/Barang Daerah Th 2016

Data diatas menjelaskan bahwa substansi materi yang diberikan pada penyelenggaraan diklat teknis ini 75,46 % peserta menilai sudah sesuai dan sisanya 24,54 % menilai kurang sesuai substansi materi pelajaran yang diberikan. Hal tersebut berarti hampir seperempat dari jumlah peserta menilai materi pelajaran yang disampaikan kurang sesuai harapan mereka bagaimana materi pelajaran tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta diklat untuk meningkatkan kompetensinya. Substansi materi pelajaran yang diberikan seharusnya disesuaikan dengan konsep materi pelajaran dan terfokus pada hal yang ingin dipahami peserta diklat dari materi pelajaran tersebut. Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah ?

2. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah ?

B. LANDASAN TEORI

Konsep Efektivitas Program

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian dalam keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengandung pengertian berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Dalam suatu organisasi, pencapaian hasil yang besar diartikan semakin besar pula efektivitas dari tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Ibnu Syamsi dalam bukunya Pokok-pokok Organisasi dan manajemen menjelaskan bahwa efektivitas menjelaskan “keadaan mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek

atau akibat yang dikehendaki” (Syamsi, 1988:2). Pendapat tersebut berarti menekankan pada suatu akibat/dampak dari proses yang dilaksanakan pada suatu kebijakan yang diharapkan terlaksana sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan mencapai hasil yang maksimal.

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) pada organisasi yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Hal tersebut menekankan bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada kemampuan organisasi dalam melaksanakan fungsinya dimana dalam proses pelaksanaannya tanpa tekanan yang berasal dari anggota organisasi. Pada organisasi, efektivitas merupakan konsep yang penting karena menggambarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarnya.

Efektivitas program organisasi dapat diketahui dengan cara membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan,1998). Pendapat dari peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dijelaskan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang telah diikuti. apakah program pelatihan bermanfaat atau tidak dan puaskah terhadap program pelatihan. Hal tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi peserta terhadap program pelatihan (Tulus,1996). Lebih lanjut, menurut pendapat Budiani (2007:53)

menyatakan bahwa untuk mengukur suatu efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

1. *Ketepatan sasaran program*, yaitu sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. *Sosialisasi program*, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. *Tujuan program*, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. *Pemantuan program*, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Selain itu, pendapat James L. Gibson yang dikutip oleh Kurniawan (2005) mengemukakan tentang ukuran dari efektivitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
- d. Perencanaan yang matang;
- e. Penyusunan program yang tepat;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana;
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

C. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pada dasarnya pendekatan ini dianggap sesuai dengan penulisan tesis ini dalam memahami fenomena yang terjadi pada suatu organisasi yang dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder serta wawancara mendalam dengan narasumber terkait Efektivitas penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif dengan memfokuskan pada proses dan efektivitas penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah serta meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan diklat tersebut. Berdasarkan pada fokus yang diambil pada penelitian ini tentang Efektivitas penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka lokasi penelitian bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung kepada informan yakni pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun data sekunder ini berupa catatan-catatan, buku-buku literature, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pada proses penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menurut hasil wawancara yang telah diperoleh menjelaskan bahwa proses yang berlangsung dimulai dari pengumpulan peserta diklat yang terdiri dari pejabat/staf potensial di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dituntut oleh instansinya atau pegawai yang ingin menambah pengetahuannya tentang pengelolaan barang daerah. Jumlah peserta pada setiap penyelenggaraan diklat berjumlah 35 orang. Kemudian Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dan instansi lain yang berperan dalam pelaksanaan diklat seperti Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai salah satu pengajar dalam diklat ini melakukan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) untuk menentukan kurikulum pelajaran yang dibutuhkan pegawai dalam meningkatkan keahlian dan kompetensinya. Rutinitas yang dilakukan selama diklat ialah sebelum memulai penyampaian materi dan praktek, peserta diklat wajib mengikuti apel pagi dan kemudian dilanjutkan pelajaran tentang pengelolaan aset/barang daerah setelah teori selesai disampaikan, dilanjutkan dengan praktek kerja lapangan. Penyelenggaraan diklat berlangsung sekitar 1 minggu. Pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan diklat ini menurut hasil yang diperoleh menjelaskan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ialah instansi pemerintah yang berfungsi sebagai tempat penyelenggara diklat dan instansi pemerintah yang mengelola pengadaan diklat dari awal perencanaan

hingga evaluasi yang dilakukan pada peserta diklat dan penyelenggara diklat yang oleh Badan pengendalian Mutu Diklat. Pada saat berlangsungnya proses penyelenggaraan diklat, panitia yang bertugas terdiri dari koordinator, pengawas dan sekretariat yang membantu memperlancar proses penyelenggaraan dari awal kegiatan hingga akhir. Selain itu tenaga pengajar juga tidak hanya berasal dari widyaiswara di BPSDMD, tapi juga berasal dari instansi lain yang dinilai memberikan peran dalam memberikan pengetahuan tentang pengelolaan aset/barang daerah serta peserta diklat sebagai pihak yang diberikan materi kurikulum diklat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kemampuannya dalam mengelola barang daerah.

Hasil penelitian tentang proses penyelenggaraan diklat ini juga menunjukkan kelancaran penyelenggaraan diklat rata-rata sesuai dengan yang diharapkan. Kelancaran tersenut dapat dilihat dari segi persiapan diklat yang menyediakan perlengkapan belajar-mengajar dengan lengkap seperti laptop, LCD proyektor/OHP dan lain-lain, asrama penginapan peserta diklat yang dilengkapi dengan sarana olahraga, poliklinik, ruang makan, ruang diskusi dan sebagainya. Tenaga pengajar dinilai telah memenuhi syarat sebagai fasilitator yang baik dalam pembelajaran materi diklat. Sebagian besar kebutuhan peserta diklat dalam mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah telah disediakan oleh BPSDMD.

2. Persiapan Penyelenggaraan Diklat

Proses penyelenggaraan diklat membutuhkan persiapan yang matang dari segi administrasi dan segi akademis agar tujuan dan sasaran penyelenggaraan diklat dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan

kemampuan dan kompetensi serta pemberian motivasi dalam berorganisasi dalam hal ini perannya sebagai pemegang jabatan pada instansi pemerintah. Fenomena yang ditemukan pada Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah ini telah dijelaskan oleh beberapa informan yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan diklat.

Hasil penelitian yang ditemukan pada fenomena peningkatan fleksibilitas pegawai menggambarkan bahwa syarat untuk menjadi peserta Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah pejabat/staf potensial di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tidak hanya diperuntukan kepada pegawai dengan jabatan pengelola barang/aset daerah saja tetapi juga pegawai dengan jabatan lain. Jumlah dari peserta diklat sebanyak 35 orang peserta yang terdiri dari sebagian pegawai dengan jabatan sebagai pengelola barang/aset daerah di instansinya, sebagian yang lain adalah pegawai dengan jabatan selain sebagai pengelola barang.aset daerah. Proses penyelenggaraan diklat terdiri dari proses administrasi (rekrutmen) peserta diklat dimana dalam proses ini mencakup kegiatan penyusunan kepanitiaan, surat pemanggilan peserta, surat kesediaan mengajar widyaiswara, kesanggupan mengajar widyaiswara, penyusunan jurnal mengajar dan matriks kompetensi widyaiswara. Selain itu peserta diklat sebelum berlangsungnya kegiatan diklat dituntut untuk memenuhi dan melengkapi prosedur penetapan peserta diklat. Sedangkan persiapan akademis mencakup kegiatan persiapan materi diklat (modul), persiapan jadwal pembelajaran, penunjukan dan penentuan widyaiswara serta syarat-syaratnya, persiapan media diklat, persiapan alat bantu pembelajaran,

persiapan setting ruang kuliah, persiapan alat evaluasi dan persiapan sertifikasi peserta.

a. Persyaratan Peserta dan Widyaiswara

Hasil penelitian memaparkan bahwa dari fenomena persyaratan peserta dan widyaiswara ialah peserta diklat merupakan pegawai yang aktif pada instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peserta diklat wajib memiliki moral yang baik dan memiliki motivasi untuk belajar dan berprestasi. Sebelum penyelenggaraan diklat berlangsung, peserta diklat dituntut untuk memenuhi prosedur penetapan peserta diklat seperti surat tugas dari pimpinan, surat keterangan sehat dari dokter serta pas foto sebagai kelengkapan berkas. Sedangkan widyaiswara harus memenuhi persyaratan seperti memiliki kompetensi sesuai bidang yang akan disajikan, menguasai materi, mampu mengajar dalam tim, serta berperilaku fleksibel dan komunikatif. Tata tertib yang telah disusun untuk penyelenggaraan diklat wajib untuk dipatuhi oleh peserta diklat selama kegiatan diklat berlangsung.

b. Ketersediaan Sarana Prasarana

Hasil penelitian fenomena kelengkapan sarana prasarana pada Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang disediakan untuk kebutuhan diklat tersedia dalam kondisi yang baik dan sarana prasarana tersebut telah memenuhi standar penyelenggaraan diklat sehingga proses penyelenggaraan diklat dapat berjalan dengan lancar.

c. Kepanitiaan Diklat

Dalam penyelenggaraan kegiatan atau program diklat yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah

yang diwakili oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dipersiapkan pihak-pihak yang berperan langsung membantu kesiapan diklat selama proses kegiatan berlangsung. Hal tersebut diharapkan dapat memperlancar kegiatan diklat agar tujuan dan sasaran diklat dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai potensial di SKPD Jawa Tengah dengan tujuan agar pegawai yang mengikuti diklat tersebut dapat mengaplikasikan pemahaman tentang perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan aset sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan diklat ini membutuhkan sumber daya-sumber daya organisasi yang hampir seluruhnya dikelola oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian tentang fenomena kepanitiaan diklat menunjukkan bahwa kepanitiaan yang disusun pada diklat bertujuan untuk memperlancar kegiatan diklat dari awal sampai akhir kegiatan diklat. Panitia tersebut terdiri dari koordinator yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamat, sekretariat dan kegiatan peserta; memeriksa ruangan kelas, AC, kebersihan, spidol/alat tulis menulis, OHP, LCD, penghapus, wireless, penerangan; memeriksa kehadiran peserta dan widyaiswara; memberikan blangko penilaian peserta dan daftar hadir; memperkenalkan widyaiswara; mengambil keputusan yang mendesak (widyaiswara tidak hadir, peserta sakit mendadak, peserta mendapat berita duka, dll);

mencatat kejadian yang urgen dan belum terselesaikan untuk ditindaklanjuti kepada petugas berikutnya; menilai peserta dalam proses pembelajaran (prakarsa dan kepemimpinan); menandatangani daftar hadir sekretariat. Panitia lainnya yaitu pengamat yang memiliki tugas datang 30 menit sebelum perkuliahan dan pulang setelah selesai perkuliahan; Memeriksa daftar hadir peserta; memeriksa ruang kelas (AC, Kebersihan, Spidol, OHP, LCD, penghapus, sound sistem, laptop, Air minum widyaiswara, dan penerangan); memberikan blangko evaluasi widyaiswara kepada peserta; menilai disiplin, prakarsa, dan kerjasama peserta; duduk di ruang kelas (mengamati peserta dan widyaiswara mengajar); mengingatkan peserta yang melanggar peraturan (merokok, menelpon, mengobrol di luar kelas, menerima tamu selama perkuliahan); mengingatkan widyaiswara, waktu istirahat atau sholat; menandatangani daftar hadir sekretariat dan mengumpulkan hasil penilaian pembelajaran. Sedangkan panitia lainnya yaitu sekretariat memiliki tugas untuk mengatur posisi duduk peserta (setiap pergantian tugas); menerima dan menindaklanjuti keluhan peserta; menyiapkan daftar hadir untuk peserta dan sekretariat; membantu pengetikan peserta/dokumen peserta; membantu peserta untuk memfotocopy; memeriksa blangko penilaian, blangko daftar hadir, dan ATK; menyerahkan honorarium widyaiswara; menandatangani daftar hadir sekretariat.

d. Evaluasi Kegiatan Diklat

Hasil penelitian tentang fenomena evaluasi diklat menjelaskan bahwa evaluasi diklat terdiri dari evaluasi peserta diklat, evaluasi penyelenggaraan diklat dan evaluasi widyaiswara. Evaluasi

peserta diklat dapat dilihat dari kegiatan belajar di kelas, kegiatan harian di asrama, kegiatan diskusi dan penyusunan tugas-tugas harian, kegiatan observasi lapangan. Aspek yang dinilai dalam evaluasi peserta lainnya ialah kedisiplinan yang terdiri dari kerapian berpakaian, ketepatan hadir dalam setiap kegiatan, kesungguhan setiap mengikuti setiap kegiatan, kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Aspek lainnya ialah kerjasama yang dilihat dari kontribusi dalam menyelesaikan tugas bersama, membina keutuhan dan kekompakan kelompok, tidak mendikte atau mendominasi kelompok, serta, mau menerima pendapat orang lain. Selain itu penilaian aspek akademis dan penguasaan materi diuji lewat pengadaan ujian pada peserta diklat. Ujian dan penilaian dilakukan untuk mengetahui motivasi dan keseriusan peserta dalam memahami, menyerap materi maupun mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Penilaian dimaksudkan untuk menentukan prestasi/tingkat kelulusan peserta berdasarkan nilai yang diperoleh di hasil ujian dan seminar. Sedangkan Penilaian kinerja penyelenggaraan adalah upaya untuk menentukan tingkat kinerja penyelenggara. Aspek yang dinilai terhadap kinerja penyelenggara adalah efektifitas penyelenggaraan, kesiapan dan ketersediaan sarana diklat, kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana, kebersihan kelas, asrama, kafetaria, dan toilet, ketersediaan dan kelengkapan bahan diklat, ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan, dan ibadah; Pelayanan terhadap peserta dan fasilitator, administrasi diklat peserta meliputi sejauhmana penatausahaan Diklat telah dilaksanakan dengan baik, tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan diklat dalam suatu file. Hasil diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan

masukannya untuk penyempurnaan program diklat yang akan datang dan bahan akreditasi Lembaga Diklat. Evaluasi pada widyaiswara dinilai dari segi pencapaian tujuan instruksional, sistematika penyajian, kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program diklat, ketepatan waktu kehadiran dalam penyajian, penggunaan metode diklat, penggunaan sarana diklat, perilaku dalam memfasilitasi pembelajaran, cara menjawab pertanyaan peserta, penggunaan bahasa, pembinaan motivasi kepada peserta, penguasaan materi, kerapian berpakaian, kerjasama di antara para widyaiswara/fasilitator (dalam tim). Penilaian terhadap widyaiswara dilakukan oleh peserta dan penyelenggara diklat. Hasilnya diolah dan disampaikan oleh penyelenggara kepada setiap widyaiswara pada masa yang akan datang.

3. Efektivitas Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Efektivitas dari suatu kegiatan dapat diukur dari beberapa hal seperti dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada pelaksanaan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang. Hasil penelitian tentang apa saja hal-hal yang menjadi ukuran efektivitas dari program Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah menggambarkan bahwa penyelenggaraan diklat baru dapat dikatakan efektif jika penyelenggaraan diklat tersebut telah melalui serangkaian evaluasi diklat yang terdiri dari evaluasi penyelenggara dan evaluasi peserta diklat. Jika hasil evaluasi mencapai predikat memuaskan dapat dikatakan diklat tersebut efektif. Selain itu, diklat juga dapat dikatakan efektif jika apa yang telah

didapat dari diklat diterapkan pada pekerjaan peserta diklat nantinya sesuai pembelajaran yang telah diberikan sehingga memberikan pengaruh yang positif terhadap produktivitas kinerja peserta diklat pada instansi masing-masing. Hal yang paling umum dalam mengukur efektivitas suatu program diklat ialah apakah sasaran dan tujuan diklat tersebut telah tercapai seperti apa yang diharapkan atau tidak.

a. Ketepatan Sasaran Program Diklat

Sasaran program diklat yang tepat merupakan salah satu tujuan diselenggarakan diklat dan diharapkan dapat tercapainya penyelenggaraan diklat yang efektif dan efisien. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya dari penyelenggara diklat pada saat perencanaan penyelenggaraan diklat hingga akhir dari kegiatan diklat sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran dan tujuan dari Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah yaitu meningkatkan kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu. Berikut ini adalah tabel hasil dari penelitian tentang fenomena ketepatan sasaran program diklat:

Hasil penelitian dari fenomena ketepatan sasaran program diklat menjelaskan bahwa sasaran untuk menjadi peserta Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah ialah pejabat/staf yang potensial di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah. Jadi tidak hanya dibatasi untuk pegawai dengan jabatan sebagai pengelola aset/barang daerah saja tapi juga terbuka untuk pegawai dengan latar belakang jabatan lain. Selain sasaran peserta diklat, tujuan diklat untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan PNS pada bidang-bidang teknis tertentu dinilai telah

tercapai. Hal tersebut dapat diketahui dari upaya-upaya yang dilakukan tenaga pengajar diklat pada proses pembelajaran yang dilakukan melalui penyampaian materi diklat dan praktek dengan baik.

b. Kejelasan Tujuan Program Diklat

Tujuan dari program diklat untuk PNS membutuhkan suatu kejelasan agar proses penyelenggaraan diklat berdasarkan pada tujuan pencapaian diklat yang telah direncanakan. Tujuan program diklat yang jelas dapat memberikan pengarahannya terhadap langkah-langkah persiapan dan upaya-upaya penyelenggara untuk menjadikan diklat sebagai sarana PNS dalam memberikan tambahan ilmu yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai pada organisasinya.

Hasil penelitian diatas menerangkan bahwa tujuan program diklat telah direncanakan dengan jelas yaitu untuk meningkatkan kompetensi PNS di bidang-bidang teknis tertentu khususnya pada bidang teknis pengelolaan aset/barang daerah. Selain itu, tujuan dari pembelajaran pada program diklat ini agar pegawai dapat mengaplikasikan pemahaman tentang perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan aset sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi operasionalisasi kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

c. Penyusunan Program Diklat

Penyusunan kurikulum diklat dilakukan oleh penyelenggara diklat yang terdiri dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan pegawai dari instansi lain yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan diklat. Kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta

diklat agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Hasil penelitian tentang fenomena penyusunan program diklat menerangkan bahwa pihak yang berperan dalam penyusunan program diklat adalah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai penyelenggara dan fasilitator dan juga pihak yang ikut menyusun program diklat yang meliputi kurikulum dan sarana prasarana yang dibutuhkan pada diklat. Selain BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Bidang Diklat teknis dalam penyelenggaraan diklat teknis, juga dibantu oleh DPPAD dalam menyusun kurikulum diklat teknis mengingat DPPAD sebagai instansi yang mengelola aset/barang daerah. Penyusunan program diklat yang dilakukan didasarkan pada Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa saja kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan pegawai untuk ditingkatkan melalui ikut serta dalam diklat ini. Sehingga program diklat ini dinilai telah tersusun dengan baik. Dalam penyusunan program diklat ini tidak ditemukan kendala yang berarti hanya saja masih ada kesulitan dalam menganalisis kebutuhan diklat peserta diklat mengingat sebagian peserta berasal dari latar belakang yang berbeda dengan pengelola aset/barang daerah. Namun, masalah tersebut didiskusikan dengan baik oleh Badan Diklat dan pihak lain yang terlibat dalam diklat ini sehingga dapat diatasi dan diklat dapat berjalan dengan lancar.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

a. Struktur Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah didirikan dengan tujuan sebagai kantor penyelenggaraan diklat pegawai sekaligus fasilitator penyelenggaraan kegiatan diklat. Kondisi dan luas lahan pada Badan Diklat telah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan diklat dimana kantor dan asrama diklat berada pada satu kawasan. Kondisi kinerja PNS yang bekerja pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dinilai bekerja dengan cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari pengadaan diklat pegawai yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi penyelenggaraan diklat ditangani dengan baik sehingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan diklat pegawai dapat berjalan dengan lancar. Bentuk formasi pegawai pada badan diklat dilakukan dengan pembentukan bidang-bidang pekerjaan tertentu agar semua urusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat pegawai dapat tertangani dengan baik. Perkembangan teknologi pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah disesuaikan dengan kebutuhan dari penyelenggaraan diklat.

b. Hubungan Organisasi dengan Lingkungan

Hasil penelitian fenomena hubungan organisasi dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa hubungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan lingkungannya cukup baik. Lokasi berdirinya BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berada pada kawasan perkantoran di daerah Srandol Semarang yang dekat dengan pemukiman warga. Peran serta lingkungan dalam penyelenggaraan diklat tidak ada. Hal tersebut dikarenakan kantor dan asrama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berada pada kawasan tersendiri dengan

lingkungan pemukiman warga. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sendiri juga telah tersedia sarana untuk operasionalisasi kantor seperti tempat fotokopi, kantin dan lain sebagainya. Dari wawancara juga dijelaskan bahwa beberapa petugas kebersihan pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ialah penduduk yang bermukim disekitar lingkungan instansi tersebut.

c. Sikap dan Perilaku Penyelenggara Diklat

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa sikap dan perilaku pengajar dalam penyampaian materi diklat yang ditunjukkan cukup profesional. Pengajar yang menyampaikan materi diklat mempunyai kompetensi dan kemampuan yang baik terhadap materi pelajaran diklat yang diberikan pada peserta. Namun dalam penguasaan kelas masih ada beberapa peserta yang mengeluhkan sikap pengajar yang dinilai kurang dalam hal menguasai kelas seperti masih ada yang kurang komunikatif dengan peserta dalam memberikan materi diklat. Akan tetapi, secara keseluruhan penyelenggaraan diklat dapat berjalan dengan efektif dan lancar.

E. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pengelolaan aset/barang daerah. Hal ini dilakukan karena aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk mengelola aset/barang secara memadai. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui optimalisasi

pengelolaan aset/barang daerah dan penyusunan neraca daerah yang didasarkan pada penilaian aset tetap daerah yang akurat dan tepat. Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, untuk mendiskripsikan implementasi program penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, peneliti telah menentukan fenomena apa saja yang ditemukan pada penyelenggaraan diklat tersebut dan menganalisisnya sesuai dengan data hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Fenomena dari efektivitas penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah telah diuraikan dan disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah :
 - a. Proses persiapan penyelenggaraan diklat terdiri dari persiapan administrasi (rekrutmen) peserta diklat dan persiapan akademis peserta diklat
 - b. Peserta harus memenuhi persyaratan prosedur penetapan peserta diklat. Sedangkan Widyaiswara dituntut memiliki kompeten dan menguasai materi di bidang yang akan disajikan.
 - c. Kondisi sarana prasarana yang disediakan cukup baik dan telah memenuhi standar penyelenggaraan diklat pegawai
 - d. Panitia diklat berperan penting pada awal hingga akhir kegiatan diklat dimana panitia diklat terdiri dari tim koordinasi, tim pengamat dan sekretariat
 - e. Pelaksanaan evaluasi diklat teknis pengelolaan aset daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi evaluasi

peserta diklat, evaluasi penyelenggaraan diklat dan evaluasi widyaiswara

2. Efektivitas program penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah :
 - a. Tujuan diklat untuk meningkatkan kompetensi PNS di bidang teknis telah tercapai dapat diketahui dari diklat tersebut telah beberapa kali dilaksanakan sebelumnya dan akan diselenggarakannya kembali untuk kedepannya
 - b. Penyusunan program diklat yang terdiri dari kurikulum dan metode pembelajaran disesuaikan dengan Analisis Kebutuhan Diklat
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program
 - a. Perkembangan teknologi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan diklat
 - b. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berdiri pada kawasan perkantoran instansi pemerintah yang dekat dengan pemukiman warga
 - c. Sikap dan perilaku pengajar dalam penyampaian materi kurikulum dinilai cukup profesional dan pengajar diklat berkompeten dalam memberikan pemahaman materi diklat.

Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar dan efektif yang dilihat dari proses penyelenggaraannya yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan diklat meliputi persiapan administrasi dan persiapan akademis, persyaratan peserta dan widyaiswara, ketersediaan sarana dan

prasarana apakah telah sesuai dengan kebutuhan diklat atau belum, pihak-pihak yang berperan sebagai panitia dalam diklat, serta evaluasi diklat. Selain itu, sasaran dan tujuan dari penyelenggaraan diklat telah tepat sebagai sarana menambah pengetahuan dan kemampuan PNS dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengelola aset/barang.

Struktur organisasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, hubungan dengan lingkungan disekitarnya serta sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam penyelenggaraan diklat menjelaskan bahwa implementasi program diklat yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah tercapai karena menghasilkan pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik dan pegawai tersebut dapat memahami pemahaman tentang pengelolaan aset/barang daerah.

Referensi

Hasibuan, S.P.Malayu. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta :

www.jatengprov.go.id

Gunung Agung

Kurniawan, Agung.2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta :
Pembaruan

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja

Setiawan, Darma.1998. *Analisis Efektivitas Program Pelatihan di Balai Latihan Instruktur dan Pengembangan CEVEST*. Tesis. Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Syamsi, Ibnu. (1988). *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Yogyakarta : Balai Pembangunan Administrasi.

Thoha, Miftah. 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil*. Jakarta : Kencana

Tulus, Agus.1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

WEBSITE

www.bpsdmd.jatengprov.go.id

www.BKN.go.id